



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**PANJA PERSIAPAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018 KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
RISTEKDIKTI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2015-2016.
Masa Persidangan ke-	: III (tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: <b>Rapat Dengar Pendapat (RDP).</b>
Dengan	: <b>1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).</b>
Hari/Tanggal	: <b>Selasa, 26 Januari 2016.</b>
Pukul	: <b>14.00 WIB - selesai.</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Teuku Riefky Harsya, M.T./Ketua Panja Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018 Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Menyusun Program Kerja; 2. Lain-lain.
Hadir	: 21 dari 29 Anggota Panja Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018 Komisi X DPR RI.
Hadir BPKP dan LKPP	: 1. Sdr. Ardan Adipradana/Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta jajarannya. 2. Sdr. Agus Prabowo/Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Persiapan Asian Games XVIII tahun 2018 Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.40 WIB oleh Ketua Panja Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018 Komisi X DPR RI/Teuku Riefky Harsya, M.T., setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai Pasal 246 ayat (1) Peraturan tata tertib DPR RI.

**II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN.**

1. Panja Persiapan Asian Games 2018 Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan dan masukan BPKP serta LKPP mengenai pengelolaan dan penggunaan anggaran Negara terkait *event* olahraga nasional dan internasional, serta pendampingan dalam penyelenggaraannya.
2. Dalam rangka penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018, BPKP telah melakukan pendampingan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan.

- Adapun mengenai penggunaan anggaran Negara terkait *event* olahraga, BPKP memberikan masukan kepada penyelenggara Asian Games 2018 sebagai berikut:
- a. Menjaga akuntabilitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - b. Melakukan langkah-langkah mitigasi risiko, pencegahan terhadap hambatan pencapaian tujuan;
  - c. Membuat dan mematuhi jadwal pelaksanaan kegiatan terutama PBJ (pengadaan barang dan jasa) sehingga mencegah terjadinya keterlambatan;
  - d. Koordinasi yang baik dengan K/L maupun stakeholder terkait;
  - e. Mendokumentasikan seluruh kegiatan terutama yang menyangkut transaksi pengadaan barang;
  - f. Menjaga dan memanfaatkan sarana dan prasarana setelah kegiatan Asian Games XVIII selesai;
  - g. Menyusun laporan pertanggungjawaban secara berkala, termasuk laporan hasil pendampingan.
3. Dalam rangka penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018, pada tahun anggaran 2015 LKPP tidak dilibatkan dan mulai dilibatkan pada Januari 2016. Selanjutnya LKPP memberikan masukan sebagai berikut:
- a. Agar seluruh pengadaan barang dan jasa yang sumbernya APBN harus merujuk kepada Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. Agar kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018 dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak (*multiyears Contract*) dan meminta Menteri Keuangan RI untuk menyetujui mekanisme tahun jamak tersebut;
4. Terhadap kegiatan dan anggaran yang telah disalurkan K/L ke KONI, KOI, Inasgoc, dan Satlak Prima pada tahun anggaran 2015 BPKP telah menindaklanjutinya dengan membuat tim. Adapun hasil kerja yang dilakukan BPKP tidak akan tumpang tindih dengan BPK RI dan justru dapat digunakan BPK RI untuk dilakukan audit lebih lanjut.
5. Panja Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018 Komisi X DPR RI meminta BPKP dan LKPP untuk memberikan dukungan penyelenggaraan Asian Games 2018 sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, utamanya untuk mencapai sukses administrasi penyelenggaraan. Seluruh paparan dan masukan BPKP dan LKPP akan menjadi bahan pertimbangan Panja Persiapan Asian Games 2018 Komisi X DPR RI untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam merumuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan Asian Games 2018.

### III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul **16.50 WIB**.

KETUA RAPAT,



TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.